

POTENSI KONFLIK PASCA BENCANA: Komunitas Islam dan Khatolik di Desa Ngargomulyo

Nur Wahid Sofyan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Abstract:

The potential conflict for post-disaster, especially between religious communities, is a fact that cannot be denied. This study portrays the potential between the Islamic and Catholic communities in Ngargomulyo Village after the Mount Merapi disaster. This research uses the framework of motive, incentive and opportunities theories popularized by Neil and Reigharts and the conflict and peace approach that was popularized by Johan Galtung. The results of the study showed that the potential conflict for post-disaster was caused by the unstable mental condition of the community and the unstable economic factors. Thus, it is expected that the role of humanitarian institutions is to provide capacity building programs for the community both through training, strengthening existing institutions in the community (RT, RW, PKK, Karang Taruna, churches, mosques, Islamic Boarding Schools, Community Group Schools /community). Other effects of disasters in the form of indirect conflict can also be mitigated by disaster management that includes aspects of mitigation response, good recovery and rehabilitation and overall distribution of aid, based on the principle of no harm in distributing aid and the principle of impartiality looking at ethnicity, religion, race and color, so that the issue of criticism does not interfere with the response period. In addition, humanitarian agencies and disaster management must consider aspects of local wisdom such as culture, the role of figure and involvement of local resources.

Potensi konflik pasca bencana khususnya antara umat beragama adalah fakta yang tidak bisa pungkiri. Penelitian

ini memotret potensi tersebut antara komunitas Islam dan Katolik di Desa Ngargomulyo pasca bencana gunung merapi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori motif, insentif dan opportunities yang dipopulerkan oleh Neil dan Reigharts serta pendekatan konflik dan perdamaian yang dipopulerkan oleh Johan Galtung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik pasca bencana disebabkan kondisi masyarakat secara mental yang labil dan faktor ekonomi yang kurang stabil. Dengan demikian, diharapkan peran lembaga kemanusiaan untuk memberikan program peningkatan kemampuan (*capacity building*) bagi masyarakat baik melalui training, penguatan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Gereja, Masjid, Pondok Pesantren, Sekolah kelompok komunitas/paguyuban). Efek lain bencana berupa konflik secara tidak langsung juga dapat diredam dengan manajemen penanganan bencana yang meliputi aspek mitigasi response, recovery dan rehabilitas yang baik serta distribusi bantuan secara menyeluruh, berdasarkan prinsip *do no harm* dalam penyaluran bantuan dan prinsip imparisialitas yang tidak memandang suku, agama, ras dan warna kulit, sehingga isu kriterisasi tidak begitu mengganggu pada masa response. Selain itu, lembaga kemanusiaan dan penanganan bencana yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek kearifan lokal seperti budaya, peran ketokohan dan pelibatan sumberdaya lokal.

Kata Kunci: *Konflik, Bencana, Islam, khatolik, Desa Ngargomulyo*

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan perubahan alam yang memiliki dampak destruktif bagi manusia. Selain menjadi penyebab menyebar luasnya kerusakan infrasturktur, penderitaan, kesengsaraan dan jatuhnya korban jiwa, bencana alam juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi politik, berpotensi untuk meningkatkan skala

konflik, bahkan sampai memicu perang dan mengubah konstelasi politik dalam dan antar negara. Sejarah telah menunjukkan bagaimana gempa bumi mempengaruhi realitas politik Athena dan Sparta dalam masa perang Peloponesian. Atau dalam konteks lokal, kita dapat melihat bagaimana Tsunami bisa menjadi katalisator yang memudahkan jalan damai di Aceh.

Di Eropa kita menjadi saksi betapa dahsyatnya cuaca dingin yang sempat membuat lumpuh perekonomian yang ada. Saat itu banyak perusahaan transportasi yang merugi, hampir 2000 penerbangan dibatalkan, transportasi darat tidak dapat berjalan karena ketebalan salju mencapai 63,5 cm dan masih banyak lagi. Nyaris semua kegiatan terhenti, karena orang tidak bisa keluar rumah. Bencana ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian negara-negara di Eropa, tapi juga diperkirakan sebagai salah satu pemicu naiknya harga minyak mentah dunia yang pada saat itu yang mencapai \$ 100 / barrel atau sekitar Rp. 8.900,- / liter.¹

Bencana alam juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Ia dapat menjadi perekat atau pun merenggangkan kohesifitas sosial masyarakat. Belum lagi jika diperhadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan akibat rusaknya kegiatan perekonomian pasca bencana. Tentu hal ini dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dan terganggunya stabilitas keamanan.

Begitu juga dalam ranah politik di mana bencana alam terkadang dimanfaatkan oleh para politisi untuk semakin merongrong kekuasaan dan melemahkan kapasitas negara. Bencana alam dijadikan isu yang digunakan untuk memuaskan kepentingan pribadi dan kelompok. Atau dalam hal penyaluran bencana, di mana

¹Meliana, S, 2013, Dampak Bencana Alam Terhadap Kehidupan Perekonomian, Jurnal Manajemen. <http://vibizmanagement.com/column/index/category/financial/2275/> diakses 23/04

bantuan kemanusiaan untuk menolong para korban justru disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan ditemukan indikasi di beberapa Daerah seperti di Aceh pasca tsunami maupun di Yogyakarta pasca gempa bumi dimana ketidaktransparanan pengelolaan keuangan dari donatur asing memicu ketidakpercayaan tidak hanya dari para pemberi bantuan terhadap pemerintah dan pengelola (NGOs) tetapi juga oleh masyarakat penerima bantuan. Dalam hal penyaluran bantuan juga terkadang memicu kecemburuan dan memanaskan isu ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Berangkat dari fenomena bahwa bencana alam tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa tetapi juga masalah stabilitas politik dan keamanan, utamanya dalam konteks kerawanan konflik yang terjadi pasca bencana, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelisik lebih dalam di wilayah tersebut. Terkhusus pada hal-hal yang terkait potensi konflik yang muncul setelah bencana erupsi merapi yang melanda tahun 2010 silam serta cara mengatasinya.

Penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan 1) bagaimana ancaman Potensi konflik itu muncul setelah bencana erupsi melanda? 2) bagaimana peran stakeholders yang terlibat untuk meredam sehingga tidak berubah menjadi kerusuhan sosial yang meluas?

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis berpijak pada beberapa pendekatan teoritis untuk menyorot persoalan kebencanaan di Desa Ngargomulyo beserta realitas lain yang menyelubunginya. Di antaranya adalah:

Motif, Insentif, Oportunities

Bencana alam tidak hanya berdampak pada kesengsaraan dan kematian langsung tetapi juga pada peningkatan tensi hubungan

sosial antar individu dalam masyarakat. Hubungan ini jelas terlihat dalam ulasan Philip Neil dan Marjolein Righarts yang bertajuk *Natural Disasters and the Risk of Violent Civil Conflict*.

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung merapi, topan, etc., terhadap resiko kekerasan dan konflik. Dalam sejarah tercatat sejumlah bencana yang punya dampak terhadap pandangan politis sebuah negara. Seperti gempa bumi di Lisbon (1755), Peru (1970), Nikaragua (1972), dan Guatemala (1976), angin puyuh di republik Dominican (1930), Haiti (1954), dan Pakistan Timur (1970), letupan vulkanis di pulau Martinique pada 1902; Tsunami di lautan India 2004 (Indonesia dan Sri Lanka), dan kemarau di Sahel dan sub Sahel Afrika.

Peristiwa ini dengan berbagai cara telah menunjukkan bagaimana bencana berdampak pada terhentinya kolonialisasi, dan dalam kasus tertentu bencana merusak daya tahan rejim, atau memantapkan *status quo* pemerintahan diktator, atau peningkatan konflik berkelanjutan dan atau konflik memperebutkan sumber daya. Meskipun tidak ada alasan untuk percaya bahwa setiap bencana alam akan selalu menimbulkan insiden konflik kekerasan sipil, namun ada bukti bahwa bencana alam secara signifikan meningkatkan resiko konflik sipil kekerasan dalam jangka pendek dan menengah, khususnya di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan serta memiliki rezim politik campuran. Neil dan Righarts menunjukkan bahwa gempa bumi dan letusan gunung berapi menimbulkan bencana resiko tertinggi, begitu juga dengan perubahan iklim secara signifikan meningkatkan risiko konflik kekerasan sipil.

Menurutnya, bencana alam mempengaruhi struktur masyarakat dengan mengganggu pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan dan kesenjangan kekayaan, memajukan

kelompok tertentu, dan meningkatkan skala migrasi. Secara krusial, bencana alam juga dapat melemahkan kapasitas negara dan legitimasi, menciptakan peluang untuk terlibat dalam perlawanan dengan menggunakan metode kekerasan. Ada tiga konsep relevan terkait dengan hubungan kausal antara bencana alam dan konflik, yaitu motif, insentif, dan peluang.

Respon atau penanggulangan untuk menolong bencana dilatarbelakangi oleh empati karena menyebarnya penderitaan akibat bencana, hancurnya lingkungan tempat tinggal yang sekaligus mengancam keberlangsungan hidup banyak manusia (*survival*) atau karena menyebarnya para pengungsi. Hal ini menjadi motif dalam merespon bencana. Namun dalam konteks bencana yang lebih kompleks motif ini juga berhubungan dengan insentif atau semacam kompensasi politik yang seringkali menjadi dampak lain dari bantuan dan respon bencana. Insentif ini dapat berupa kompetisi dari setiap pihak yang berkepentingan untuk memperebutkan sumberdaya yang terbatas, atau perebutan kekuasaan di antara elit-elit politik. Untuk berbuah menjadi bencana konflik kekerasan, insentif dan motif politik yang terselubung dari pihak yang berkepentingan hanya menunggu momentumnya saat terbukanya kesempatan (*opportunities*) dalam sebuah negara. Kesempatan itu dapat berupa kapasitas negara yang melemah akibat bencana, atau pergeseran fokus perlawanan oposisi, atau lemahnya legitimasi negara karena ketidakmampuan negara untuk merespon bencana secara keseluruhan dan cenderung menyalahkan bencana, atau kecenderungan negara untuk melibatkan militer untuk merespon bencana bahkan dapat berefek sampai pada keterlibatan group pemberontak yang mengambil kesempatan. Dari ketiga konsep sederhana yang saling berhubungan ini dapat ditarik benang merah yang menghubungkan antara bencana dan kemungkinan resiko konflik yang meningkat dan kemungkinan terjadi.

Penjelasan Neil and Reigharts tersebut sejalan dengan analisa Brancati tentang hubungan gempa bumi dan dampaknya terhadap konflik intra negara. Menurutnya;

“Earthquakes, I argue, increase intrastate conflict by creating scarcities in basic, life-sustaining resources (e.g., food, water, and housing).... Finally, scarcities in energy supplies can arise from earthquakes knocking down power lines, contaminating oil supplies, and destroying infrastructure needed to deliver energy supplies to homes and businesses”.
(Brancati, 2007).

Kedua penelitian di atas dapat dijelaskan dengan sederhana dengan menggunakan pendekatan konflik dan perdamaian yang dipopulerkan oleh Johan Galtung bahwa kekerasan (langsung dan struktural) dapat saja terjadi akibat ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, kurangnya kesejahteraan dan terganggunya pemenuhan hak-hak mendasar (sandang, pangan, papan) individu, kelompok dan masyarakat. Hal ini merupakan pemicu utama terjadinya konflik sementara alam dapat menyebabkan atau memperparah faktor pemicu konflik tersebut.

Selain pendekatan dari Galtung, analisis konflik dan kekerasan dapat juga ditemukan dalam pemikiran Coser. Coser menunjukkan bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk ekspresi sosial yang ditunjukkan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Dalam konteks bencana hal ini dapat terjadi manakala seseorang merasa terpaksa berbuat kejahatan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kekerasan menjadi tanda dari adanya disfungsi sosial yang telah diganggu dan dirusak oleh bencana alam. Oleh karena itu potensi konflik pasca bencana menjadi bahaya laten yang mengerikan apabila bencana alam tidak teratasi dengan baik.

Do No Harm

Prinsip *do no harm* menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak hanya cukup dengan niat baik dan keikhlasan untuk membantu tapi perlu mempertimbangkan tantangan yang ada serta pemahaman yang baik terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Teory yang diperkenalkan oleh Mary B. Anderson ini memberikan pemahaman terhadap situasi masyarakat utamanya korban bencana dan pertimbangan yang mendalam ketika menyalurkan bantuan dan melakukan aktivitas kemanusiaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memahami faktor pendukung/penghubung (*Conectors*) dan penghambat (*Diveders*), misalnya dengan menjaga netralitas serta menghindari bekerja sama dengan pihak yang dianggap dapat mengganggu ikatan sosial (Anderson, 1999).

Salah satu prinsip dalam kerangka *Do no harm* ini adalah apakah intervensi yang dilakukan bisa memperkuat ikatan di masyarakat (*Connector*) ataupun intervensi ini malah membuat semakin tajamnya perbedaan-perbedaan (*Divider*) antara kelompok-kelompok yang ada di satu wilayah. Untuk menghindari semakin melebarnya tingkat kohesifitas sosial di masyarakat, yang diperlukan adalah strategi yang tepat dalam intervensi program dan kegiatan yang dilakukan. Hal ini menjadi sebuah kemestian utamanya di wilayah yang memiliki potensi konflik yang tinggi. Dan itu terjadi untuk daerah pasca konflik maupun wilayah yang telah dilanda bencana.

Dalam konteks bencana, prinsip *do no harm* yang diejawantahkan dalam aksi kemanusiaan dapat dilihat dalam beberapa indikator -yang bekerja dalam logika kausalitas sebab intervensi program tentu memiliki dampak baik atau buruk terhadap masyarakat- seperti; *pertama*, sistem dan intitusi yang dugunakan dan dilibatkan dalam kegiatan kemanusiaan. Apakah sistem tersebut telah cukup menjamin hak semua pihak ataukah justru mengandung

mekanisme diskrimantif yang mengeliminasi hak kelompok lain. Apakah intitusi yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan kemanusiaan itu cukup representatif dan dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian bagaimana dengan intitusi yang turut berperan serta dan bekerja bersama di dalam sistem tersebut? Di sini penting untuk melihat apakah sistem dan institusi yang ada cukup diterima atau mendapatkan penolakan dari masyarakat juga termasuk sistem dan institusi mana yang dapat merekatkan hubungan dan mana yang dapat memunculkan kerenggangan (*divider*).

Kedua, adalah *attitudes* dan *actions*. Yang menjadi penting di sini adalah sikap dan kegiatan yang seperti apa yang dapat membangun kerekatan hubungan. Di sinilah pentingnya pemahaman akan kondisi masyarakat dan komposisi perbedaan yang ada beserta dengan nilai yang mereka anut. *Ketiga*, *value* dan *interests* untuk melihat nilai yang dapat menyatukan serta kepentingan bersama yang dimiliki. Dan ke empat *symbols* dan *occasions* dalam mendistribusikan bantuan. Pertimbangan sensitifitas masyarakat terhadap simbol-simbol tertentu maupun momentum aksi kemanusiaan yang dilakukan melalui bantuan langsung atautkah program kegiatan juga sangat menentukan kesuksesan atau dampak buruk dari kegiatan kemanusiaan yang dijalankan.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Kehidupan Desa Argomulyo

Desa Ngargomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Magelang, Kecamatan Dukun, Propinsi Jawa Tengah mengalami dampak yang parah saat erupsi Merapi 2006 dan 2010. Desa ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan area Merapi di sebelah baratnya. Desa ini termasuk desa yang kecil dengan 11 dusun. Dusun tersebut adalah Sabrang, Kembang, Tanen, Batur Ngisor, batur nduwur, Gemer, Tangkil, Ngandong, Karanganyar, dan Bojong. Meski daerah pedusunan relatif kecil desa yang terdiri dari 21 RT ini memiliki areal hutan yang cukup

luas. Hutan ini merupakan daerah tangkapan air yang penting di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo, salah satunya adalah Sungai Blongkeng. Sungai Blongkeng memiliki aliran cukup deras dan airnya sangat jernih. Keberadaan hutan yang masih bagus membuat sungai ini selalu mengalir sepanjang tahun. Faktor inilah yang menjadikan sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani.

Ciri masyarakat petani di desa ini cukup kental. Masyarakat bahu-membahu baik tua maupun muda turun ke sawah. Selain bertani, mereka juga beternak sapi. Hiruk-pikuk masyarakat berangkat mencari rumput maupun ke sawah sangat tampak setiap pagi menjelang. Selain pertanian kerajinan di desa ini cukup menonjol, kerajinan anyaman bambu di desa ini sudah menjadi aktivitas yang turun-temurun. Ketersediaan bambu yang cukup melimpah menyebabkan pengrajin anyaman bambu sangat mudah mencari bahan baku. Di Dusun Sabrang dan Tanen hampir tiap keluarga, para ibu rumah tangga setiap hari punya kebiasaan menganyam bambu. Hasil kerajinan ini antara lain Kepang, Besek, Tepas, pyan dan pagar. Ngargomulyo juga kaya akan kesenian daerah. Kesenian yang telah mengakar antara lain Jantilan, Reog, Karawitan, Jaelantur, Angguk, Cakar lele, kuda lumping, topeng ireng dan lain-lain.

Desa ini juga memiliki proporsi penduduk yang cukup heterogen. Sekitar 55% penduduknya beragama Islam dan 40 % beragama Khatolik dan 5% sisanya beragama lain. Dan hal yang menarik dari desa ini bahwa masyarakat Ngargomulyo yang sederhana masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Budaya sambatan (gotong-royong) adalah salah satunya. Ketika sebuah keluarga membangun rumah maka para tetangga secara sukarela turut membantu.

Potensi Konflik di Desa Ngargomulyo

Meskipun kehidupan sosial di Desa Ngargomulyo nampak tentram, rukun dan damai namun tetap saja tersimpan bahaya laten yang tersembunyi. Yang dimaksud di sini adalah potensi gesekan antar masyarakat atau konflik yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Menelusuri dan mengungkap fakta itu, tentu memerlukan pendekatan historis untuk melihat bagaimana proses pembentukan, differensiasi dan interaksi sosial kultural masyarakat Ngargomulyo.

Seperti yang diungkap di atas, bahwa sekitar 45% masyarakat di Desa ini merupakan penduduk yang beragama Khatolik. Menurut fakta sejarah yang ada, Fransiscus Georgius Josephus van Lith, seorang Pastur Jesuit, menjadikan kawasan lereng Merapi sebagai pusat pengembangan misi Katolik di tanah Jawa pada tahun 1899. Pada perkembangannya, Kolese Xaverius yang didirikan van Lith mampu mencetak para guru dan imam pribumi yang tersebar hampir di seluruh Jawa bahkan Indonesia.²

Strategi penyebaran agama yang digunakan adalah dengan menggunakan inkulturasi, yakni sebuah proses olah budaya di mana seorang Katolik tetap merasa bisa sebagai orang Katolik tanpa menghilangkan bahkan mengurangi sedikit pun identitasnya sebagai orang Jawa. Identitas Khatolik melebur dan bersatu menjadi identitas kejawaan. Konsep inkulturasi budaya yang ditawarkan para rohaniawan Katolik tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara luas, termasuk di Desa Kecamatan Dukun dan Desa Ngargomulyo sebagai pusat persebaran ajaran Khatolik. Oleh karena itu, cenderung sulit untuk membedakan secara kasat mata yang mana orang muslim dan kristen di Ngargomulyo sebab, umat Katholik di sana menyukai berpakaian ala orang Islam, seperti memakai peci

² hidupkatolik.com, 2013, Kader Van Muntilan, released 5 Mei 2013, viewed 04/06/2013 <<http://www.hidupkatolik.com/2013/05/01/kader-van-muntilan>>

dan baju koko. Bahkan ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh umat Muslim mereka pun menggunakannya, seperti *insya'allah*, *Alhamdulillah*, *masya'allah*, *assalamualaikum*.

Proses kristenisasi di Desa Ngargomulyo sendiri masih berlangsung. Gerakan kristenisasi masuk ke Desa Ngargomulyo dipelopori oleh salah satu LSM Kristen bernama Yayasan Cinta Kasih. Yayasan ini masuk ke desa Ngargomulyo secara resmi diketahui oleh aparat Desa Ngargomulyo pada tahun 2000 sedangkan secara kelembagaan yayasan ini masuk pada tahun 1995.³ NGO yang berbasis agama ini dengan sangat progresif menjalankan misinya dan didampingi langsung oleh para tokoh khatolik di sana. Adapun program-program yang dijalankan oleh yayasan ini seperti memberikan bantuan berupa 50% material untuk pembangunan rumah, mengadakan pengadaan air bersih, membuat kamar mandi atau wc untuk masyarakat, memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak SD hingga SMA, dan mengadakan les tiap pekan.

Selain itu, di sepanjang lereng Merapi dan Merbabu banyak berdiri padepokan seni, yang bertujuan untuk melestarikan budaya asli masyarakat. Para pendiri padepokan tersebut ada yang bergelar "Romo" dan ikut berkecimpung secara aktif. Salah satu yang ditokohkan adalah Romo Vincentius Kirjito. Ia dikenal sebagai budayawan penggagas dan pemrakarsa pagelaran-pagelaran budaya Merapi di wilayah Barat. Sebagai seorang pemimpin Katolik, ia mengintegrasikan kesenian Merapi dalam liturgi, pastoral, diskusi⁴. Selain sanggar seni, kaum misionaris juga membuka Lembaga Kursus dan Bimbel, atau Taman Baca gratis. Program ini menysar

³ Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Ahmad Natsir, 2012, Islamisasi, Inkultrurisasi dan Kristenisasi di Lereng Merapi, http://www.stidnatsir.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=189:islamisasi-inkulturisasi-dan-kristenisasi-di-lereng-merapi di akses 04/06/2013

⁴ Ibid

anak-anak muslim mulai SD sampai SMA. Misi non-Islam disisipkan di sela-sela pembelajaran berupa nyanyian-nyanyian kerohanian atau gambar-gambar. Para misionaris juga secara terbuka (*door to door*) menawarkan bantuan kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako (sembilan bahan pokok), alat sekolah, dan prasarana pertanian.

Respon Umat Islam Terhadap Kristenisasi di Area Merapi

Menanggapi aktivitas kristenisasi di kawasan barat Merapi, umat Islam utamanya para tokoh dan kalangan pesantren merasa perlu untuk turut mengintensifkan misi dakwah dan islamisasi di kawasan yang sama. Meskipun rintisan dakwah di daerah lereng Merapi telah dimulai pada tahun 1700-an. Namun upaya tersebut dipandang perlu semakin digalakkan mengingat gencarnya upaya kristenisasi. Karena itu berbagai pesantren, sekolah, dan tamanpengajian marak didirikan baik dari kelompok NU maupun Muhammadiyah di Kecamatan Dukun.

Desa Ngargomulyo sendiri, upaya tersebut dilakukan oleh beberapa tokoh agama. Salah satunya adalah Uztad Nasta'in yang juga merupakan pengasuh pondok pengajian Al-Inayah Desa Argomulyo. Ia menuturkan upaya dakwah tersebut mulai digalakkan lagi sejak tahun 1986. Aktivitas yang dilakukan dimulai dengan membangun pondok pengajian untuk anak-anak dan remaja dan berdakwah di kalangan masyarakat islam kejawaen di Ngargomulyo. Hal ini dilakukan sebagai langkah membendung efek domino penyebaran Khatolik di kawasan Merapi. Dan hasilnya, setelah beberapa tahun berselang semua dusun di Desa Ngargomulyo telah dibangun Musholla.

Upaya islamiasi yang dilakukan bukan tanpa resistensi. Bahkan ketika upaya dakwah yang dilakukan oleh Uztad Nastho'in, di masa-masa awal ia kerap mendapatkan teror dan ancaman. Beliau mengungkapkan ketika Musholla yang menjadi pusat aktivitas pengajian dan dakwah tersebut baru selesai dibangun, ia secara

pribadi mendapat teror. Namun, beliau mencoba menyelesaikannya dengan gertakan dengan mengandalkan solidaritas sesama muslim yang bermukim di desa lain dan mengancam jika sekiranya terjadi sesuatu padanya maka mobilisasi massa muslim dari desa lain akan berdatangan dan menyerbu serta memberikan aksi balasan.⁵

Pergesakan dan konflik dalam skala kecil juga kerap terjadi meski tidak berbuah menjadi konflik kekerasan fisik. Meski hanya terjadi pada wilayah “percekcokan” karena perbedaan prinsip agama, namun hal tersebut masih kerap terjadi. Tahun 2012 misalnya terjadi ketika salah satu tokoh gereja meninggal dan kaum muslimin yang datang melayat sempat menimbulkan ketersinggungan di kalangan umat Khatolik karena umat Islam yang hadir tidak ingin menyantap hidangan yang dihidangkan di Gereja. Alasan keharaman menjadi sesuatu yang memicu ketegangan dan hampir menyebabkan konflik dan kekerasan langsung. Untungnya upaya dialog dan pemberian pemahaman tentang alasan logis mengenai hukum haram dan halal dalam agama Islam dapat dimengerti dan diterima oleh umat Khatolik.⁶

Aksi Kemanusiaan Pasca Bencana

Gunung Merapi meletus pada tanggal 26 Oktober 2010 pukul 17.45 dan respon kemanusiaan terhadap kejadian ini tentu berfokus pada upaya penyelamatan, pertolongan, evakuasi dan pemberian bantuan terhadap korban (pengungsi). Untuk konteks penanggulangan daerah pasca bencana tahapan respon yang dilakukan meliputi tiga tahapan dalam siklus manajemen bencana di antaranya adalah:

- **Response/ tanggap darurat**

Tahap ini bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat

⁵ Hasil wawancara dengan Uztadz Nastho'in, 2013

⁶ Hasil wawancara dengan Uztadz Nastho'in, 2013

ini adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana.

○ **Recovery**

Tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat. Seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi dilakukan melalui sejumlah kegiatan, meliputi:

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana.
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum.
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
4. Pemulihan sosial psikologis.
5. Pelayanan kesehatan.
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
7. Pemulihan sosial ekonomi budaya.
8. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
9. Pemulihan fungsi pemerintahan.
10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

○ **Development**

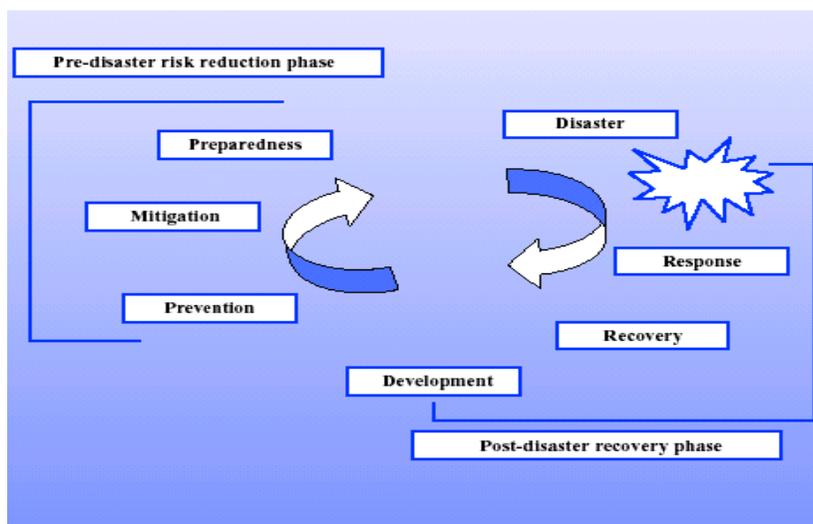
Tahap ini bertujuan membangun kembali daerah bencana dengan melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana.

2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
7. Peningkatan fungsi pelayanan publik.
8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Siklus Manajemen Bencana

Untuk melihat bagaimana hubungan penanganan bencana dengan potensi konflik setelah terjadinya bencana maka akan ditelisik lebih dalam bagaimana mekanisme jalannya program dan



penyaluran bantuan berdasarkan ketiga tahapan penanggulangan bencana di atas. Ke tiga tahapan penanggulangan di atas, terutama dilihat dari aspek program yang dilakukan yang mencakup penilaian efektivitas program termasuk implementasi prinsip *do no harm*,

relevansi, impact dan motif batuan terhadap korban. Juga dilihat bagaimana koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada setiap tahapan penanganan pasca bencana.

Di Desa Ngargomulyo sendiri, ketika merapi meletus penanganan bencana dilakukan dengan melibatkan beberapa stakeholders yang ada. Seperti pemerintah dalam hal ini BPBD Magelang, dan organisasi kemasyarakatan Ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang masing-masing diwakili oleh MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) dan LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama), NGO Khatolik KARINA KAS (Karitas Indonesia Keuskupan Agung Semarang), Santri Siaga Bencana, Pasak Merapi, dan personel komunitas KSB (Kampung Siaga Bencana) Ngargomulyo dan pemerintah Desa Ngargomulyo.

Tahap Response

Ketika Erupsi Merapi terjadi, peran vital dua organisasi kemanusiaan yang berbasis agama (*Faith Based Organization*), seperti LPBI NU dan KARINA KAS tidak dapat dinafikan. Kedua organisasi ini secara bersama-sama telah lama melakukan pendampingan dan pemberdayaan di komunitas masing-masing sehingga evakuasi dan respon darurat dengan mudah dilakukan. Pendampingan mereka bertujuan untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana dan sekaligus berupaya untuk mengurangi tingkat resiko yang dimiliki di zona bahaya.

Untuk mendorong kesadaran masyarakat supaya terlibat dalam kegiatan tanggap bencana, Karina-KAS menjalankan program Pengurangan Resiko Bencana Oleh Masyarakat (PRBOM). Program ini diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 2008 di Paroki St. Maria Lourdes, Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Paroki dan komunitas-komunitas yang ada di

wilayah tersebut diajak untuk merencanakan kegiatan pencegahan, pengurangan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi situasi kebencanaan. Khususnya untuk mengurangi ancaman hilangnya nyawa dan harta benda yang mungkin terjadi karena bencana di wilayah lereng Gunung Merapi. Melalui kegiatan ini, komunitas masyarakat utamanya kaum Khatolik diberdayakan melalui program pelatihan training of trainer di Desa Ngargomulyo (KARINA KAS 2010).

Pada saat erupsi, respon darurat yang diberikan oleh KARINA KAS selain upaya evakuasi dan pendirian posko penampungan pengungsi sementara adalah dengan melakukan distribusi bantuan logistik dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan pengungsi. KARINA KAS bekerjasama dengan posko-posko bantuan yang berbasis di tiga paroki yaitu : Pakem, Somohitan, dan Sumber. Misalnya membagikan 300 nasi bungkus ke posko paroki Sumber, 100 ke posko Somohitan dan 200 ke posko Pakem. Termasuk memberikan selimut 2000 selimut dan 2000 sarung, serta peralatan kesehatan seperti masker, obat tetes mata, dan obat batuk, khususnya untuk infeksi saluran pernapasan (KARINA KAS 2010).

Sedangkan di komunitas Islam pada saat bencana SSB LPBI NU dengan sigap memberikan pertolongan Penanggulangan Bencana sejak 25 Oktober 2010 dengan mendirikan Posko SSB di Kecamatan Dukun dan Srumbung, Magelang dua daerah yang terkena letusan gunung Merapi. Aktifitas yang dilakukan Posko SSB adalah mengorganisir 100 orang relawan yang membantu dapur umum, evakuasi, dan komunikasi (Abdurrosyad, 2010). Hal lain yang tak kalah pentingnya dilakukan adalah pendataan jumlah pengungsi dan kebutuhan pengungsi yang tersebar di beberapa TPS (Tempat Penampungan Sementara), antara lain TPS lapangan Gluduk, TPS Gedung KPRI Dukun, TPS Ngadipuro, TPS Ketunggeng, TPS Tanjung (Dapur Umum Kabupaten), TPS

Kaliurang Srumbung, TPS Jeruk Agung, TPS Balaidesa Gulon, dan TPS Bendan.

SSB di bawah LPBI NU sendiri telah lama melakukan dan menjalankan program pengurangan resiko bencana dan meningkatkan kapasitas untuk menghadapi bencana berbasis komunitas utamanya di kalangan santri (Santri Siaga Bencana). Dengan dipelopori Pesantren Al Inayah Desa Argomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, masyarakat santri menerapkan konsep SSB (Santri Siaga Bencana) sebagai basis pada Pengurangan Resiko Bencana melalui (1) peningkatan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat dan para santri dengan cara sosialisasi dan (2) pengembangan ekonomi lokal untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Upaya menumbuh-kembangkan kesadaran para santri agar selalu siaga dalam menghadapi bencana dimasukkan dalam kurikulum pesantren. Para pengurus pesantren memasukkan materi khusus tentang pengurangan risiko bencana untuk para santri.

Pada 2008, terdapat pelatihan-pelatihan yang melibatkan SSB dimana pesertanya diikuti oleh 30 orang peserta dari 5 kecamatan, yaitu Muntilan, Dukun, Srumbung, Borobudur, dan Kajoran. Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi *training of facilitator*, PDRA (*Participatory Disaster Risk Analysis*), dan pelatihan ERT (*Emergency Respon Training*). Selain itu terdapat kegiatan kerjasama antara SSB dengan KSM (Kelompok Swadaya Mandiri) melalui wadah *SSB Meeting*. Aksi bersama ini diimplementasikan melalui kegiatan penghijauan di 5 desa, yaitu Gunungpring (Muntilan), Giripuno (Borobudur), Pucungroto (Kajoran), Argomulyo (Dukun), dan Argosoka (Srumbung).

Rangkaian kegiatan inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan bencana merapi 2010 di Umbulharjo. Dengan melibatkan kerjasama dan koordinasi yang baik utamanya di tingkatan komunitas pasak merapi, pemerintah

desa dan Karina KAS dan SSB upaya penanganan bencana utamanya pada masa pengungsian dan evakuasi korban sebelum erupsi di Ngargomulyo menjadi lebih mudah dilakukan. Ditambah lagi pengalaman masyarakat ketika erupsi merapi menjadikan masyarakat desa Ngargomulyo sudah terbiasa dan tidak canggung berhadapan, berkomunikasi dan bekerjasama dengan para relawan. Dalam melakukan aksi tanggap darurat, SSB dan KARINA KAS juga bekerjasama dengan pemerintah setempat. Setelah melakukan koordinasi bersama aparat terkait, keduanya bersama dengan elemen lain berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Mereka berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Perhubungan yang bertugas untuk melakukan evakuasi. Setelah itu, mensosialisasikan evakuasi bencana berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana penanganan korban dan penyaluran bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan tanpa motif tertentu. Motif yang dimaksud di sini adalah niat terselubung dibalik bantuan yang diberikan pada masa respons tanggap darurat. Isu yang sempat merebak adalah adanya upaya pemurtadan atau kriterisasi di kalangan pengungsi. Hal ini pun diakui oleh pihak gereja perihal isu yang berhembus. Dalam laporan KARINA KAS disebutkan bahwa upaya pertolongan terhadap korban utamanya di lokasi pengungsian menghadapi tantangan oleh isu kriterisasi yang mengakibatkan penolakan oleh sebagian korban di barak pengungsian. Karena itu, untuk tetap dapat memberikan bantuan kemanusiaan berdasarkan prinsip imparialitas maka KARINA KAS bekerja sama dengan LPBI NU dan relawan SSB dalam menyalurkan bantuan. *Christianization issue has become new challenge. In Ganjuran Parish, some fundamentalists have repelled IDPs that stayed in the parish compound. Even though there is no*

intention to do Christianization, they still think IDPs will be a Christian if they accept relief item from the Church. Now, those IDPs are staying in the Major official house. Since then, some parishes work more carefully and try to work in collaboration with other institution. Klepu Parish (40 km from the peak of Merapi) has already work with Nadhlatul Ulama, a religious (Moslem) civil organization, to distribute relief item. (KARINA KAS, 2010).

Selain masalah di atas, juga terdapat perbedaan penanganan bencana pada tahap ini, dengan penanganan masa tanggap darurat pada erupsi di tahun 2006 sebelumnya. Pemerintah dalam hal ini BPBD Magelang, telah memiliki pengalaman dan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti kejadian tahun 2006 dimana Partai Politik diikutsertakan dalam memberikan bantuan dan pendirian posko bantuan. Pada waktu itu terjadi kekisruhan karena partai politik justru berebut pengaruh dan simpati dari para pengungsi yang ternyata menimbulkan kekisruhan. Belajar dari pengalaman tersebut, BPBD Magelang akhirnya menetapkan aturan yang melarang keikutsertaan langsung Partai Politik dalam penanganan bencana erupsi di tahun 2010 (Ansyori, 2013).

Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pembangunan)

Beragam aktivitas dan program dijalankan di desa Ngargomulyo pasca erupsi. Di antaranya yang bersifat jangka menengah adalah upaya pemulihan psikis bagi para korban. Untuk komunitas muslim hal ini dipelopori oleh kalangan pesantren yang banyak menerjunkan para da'i yang tidak hanya memberikan siraman rohani tetapi juga memotivasi untuk bangkit pasca keterpurukan kondisi akibat bencana. Upaya ini sejatinya telah dilakukan semenjak para pengungsi berada di barak pengungsian. Selain itu, SSB juga memberikan pelatihan kerajinan anyaman dan menyiapkan bahan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar para pengungsi tetap memiliki kegiatan yang produktif karena hasil kerajinan dapat dimiliki dan dijual. Dalam hal pemulihan

psikis tadi, upaya yang sama dilakukan oleh KARINA KAS yang memberikan pendampingan psikologis untuk *trauma healing* bagi para korban, utamanya bagi anak-anak. Pendampingan psikososial KARINAKAS bekerjasama dengan komunitas Tlatah Bocah, Universitas Katolik Soegijapranata, dan Dinamika Edukasi Dasar. Ini juga dilakukan oleh SSB dengan memberikan program pembelajaran inklusif bagi anak-anak, pengajian untuk TPA dan sarana dan program permainan khusus bagi anak-anak.

Kegiatan lain yang dilakukan untuk kebutuhan pemulihan pasca erupsi adalah dengan melakukan program kerja bakti secara gotong royong yang melibatkan semua anggota masyarakat, relawan dan NGO yang ada. Program lainnya adalah pembuatan sarana MCK dan air bersih. Kebutuhan air bersih dan sarana MCK menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena banyak sarana air bersih yang rusak akibat tertimbun abu vulkanik dan lahar dingin. Pada awal 2011, dilakukan pembangunan sarana MCK dan air bersih di 5 kecamatan (Dukun, Srumbung, sawangan, Mungkid, Ngluwar). Sedangkan pelaksana program dilakukan oleh LPBI-NU (SSB) dengan UNOCHA. Sebagian proyek juga diambil dan dijalankan serta bekerjasama dengan KARINA KAS.

Program rekonstruksi dan rehabilitasi, selain bantuan dari donor (non Pemerintah) melalui lembaga swadaya masyarakat yang ada, tentu lebih banyak dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk daerah Kabupaten Magelang sendiri, pemerintah melalui BNPB bekerjasama dengan PEMDA Magelang telah menjalankan proyek rekonstruksi dan rehabilitasi senilai Rp.93,6 Milyar. Program tersebut antara lain (1) Sektor permukiman sub sektor perumahan, (2) sektor infrastruktur sub sektor transportasi, (3) sektor ekonomi produktif sub sektor pertanian dan kehutanan, (4) sektor ekonomi produktif sub sektor peternakan, (5) sektor sosial sub sektor kesehatan, dan (6) lintas sektor (BNPB, 2013).

Namun, pengucuran bantuan langsung dari pemerintah utamanya dalam hal bantuan dana rekonstruksi kepada korban dinilai sangat lambat karena harus melewati beberapa prosedur dan validasi data sebelum bantuan disalurkan. Program yang disebutkan dalam paragraf di atas baru diresmikan pada 5 April 2013 itupun dengan penyerapan dana yang baru mencapai Rp 78,3 milyar . Itu berarti masih sisa Rp 17,8 milyar yang disebabkan adanya sisa tender, dan masih terdapat 214 kepala keluarga yang belum dapat direlokasi akibat kesulitan mendapatkan lahan untuk keperluan pembangunan hunian tetap (PEMDA Magelang, 2013). Hal ini tentu berakibat pada lebih progresifnya bantuan dari pihak swasta baik secara langsung ataupun melalui lembaga NGO yang bermitra dengan donor. Hal ini tentu tidak terlepas pada persoalan motif bantuan yang diberikan.

Tantangan terbesar lahir, utamanya bagi organisasi yang berbasis agama. Isu kristenisasi pada tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi ini semakin santer terdengar berbarengan dengan semakin derasnya arus bantuan bagi korban di daerah yang dilanda bencana termasuk di Desa Ngargomulyo. Satu kejadian yang tercatat di Desa Argomulyo adalah ketika status merapi telah diturunkan dan penduduk kembali ke rumah masing-masing, beberapa keluarga mendapatkan undangan di Masjid untuk menerima bantuan namun selain sembako, salah satu isi dalam paket bantuan itu adalah kitab suci agama tertentu.

Pendekatan lain yang dilakukan Katolik untuk memurtadkan umat Islam di antaranya berupa pemasangan instalasi air bersih, pemberian bantuan dana perbaikan rumah senilai 15 juta untuk setiap rumahnya, beasiswa di sekolah-sekolah misionaris, penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan sejumlah keterampilan, serta pemberian bibit pertanian dan peternakan.

Selain itu, mereka memanfaatkan kebudayaan lokal, seperti mendirikan kelompok-kelompok kesenian tradisional, dan sejumlah

program terselubung seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Katholik Sugiyopranoto yang sengaja ditempatkan di dusun-dusun Islam, mengajak remaja Muslim mengikuti *outbond* ke sendang Gua Maria. Cara lain yang dilakukan melalui program "*stay in*", yaitu mengundang orang-orang Asing dan menginap mereka di rumah-rumah warga Muslim selama beberapa hari. Meski mereka memakai bahasa isyarat, tapi cara ini terbukti efektif untuk membangun persahabatan hingga bisa menyeret umat Islam yang dhuafa itu ke dalam agama Kristen. Kegiatan tersebut intens dilakukan utamanya setelah bencana merapi 2010 terjadi. Meskipun kegiatan tersebut terkesan positif namun cukup meresahkan warga muslim utamanya dari kalangan santri pondok pesantren.

Menanggapi "motif terselubung" dari beragam bantuan dan kegiatan yang disalurkan di Desa Ngargomulyo, kalangan santri utamanya para tokoh muslim baik dari kalangan NU dan Muhammadiyah semakin mengintensifkan dakwah di kawasan merapi utamanya di Desa Ngargomulyo. Hal ini merupakan pilihan yang paling rasional untuk tetap menciptakan kondisi yang aman. Upaya persuasif sering dilakukan dengan kunjungan dan pembinaan keakraban di antara masing-masing tokoh agama. Untuk konteks desa Ngargomulyo sendiri, peran ketokohan ini sangat vital dilakukan oleh Romo Kirjito dan KH. Wahid Ansyori dan Ustd. Nastho'in. Masing-masing tokoh ini kerap sekali bertemu dalam forum lintas agama maupun dalam acara keagamaan yang dilakukan oleh komunitas masing-masing. Para Tokoh ini pula yang berperan besar dalam menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran agama masing-masing sehingga meminimalisir potensi konflik yang ada.

Hal lain yang menyebabkan tetap terjaganya suasana kondusif kehidupan sosial di Desa Ngargomulyo adalah bahwa tingkat persebaran dan jumlah populasi pemeluk Khatolik di wilayah Magelang tidak begitu signifikan. Jumlah populasi yang

tidak begitu besar jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Ambon dan Poso tentu menjadikan pihak Khatolik lebih mengedepankan perdamaian ketimbang memicu terjadinya konflik. Selain faktor yang lain yakni rasa kekeluargaan sebagai orang Jawa yang tetap menjadi pemersatu meskipun beda agama. Di tingkatan akar rumput (*grass root*) identitas budaya kejawaan yang sama tetap menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam hal membangun solidaritas kemanusiaan ketimbang ideologi ke-agama-an.

KESIMPULAN

Peran lembaga kemanusiaan untuk memberikan program peningkatan kemampuan (*capacity building*) masyarakat baik melalui training, penguatan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Gereja, Masjid, Pondok Pesantren, Sekolah kelompok komunitas/paguyuban) supaya dapat terlibat dalam tanggap darurat melalui sumber daya yang ada dan koordinasi di antara mereka merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk melatih dan membiasakan serta menyiapkan masyarakat menghadapi bencana. Efek lain bencana berupa konflik secara tidak langsung juga dapat diredam dengan manajemen penanganan bencana -yang meliputi aspek mitigasi response, recovery dan rehabilitasi- yang baik serta distribusi bantuan secara menyeluruh, berdasarkan prinsip *do no harm* dalam penyaluran bantuan dan prinsip imparialitas yang tidak memandang suku, agama, ras dan warna kulit. Hal ini yang menjadi sehingga isu kritisitas tidak begitu mengganggu pada masa response.

Selain itu, lembaga kemanusiaan dan penanganan bencana yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek kearifan lokal seperti budaya, peran ketokohan dan pelibatan sumberdaya lokal. Dalam aktivitas tersebut, lembaga - lembaga kemanusiaan juga harus terus mendorong pemerintah menjalankan fungsinya karena merekalah penanggung jawab utama dalam situasi itu. Dengan

semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah setempat dalam menghadapi ancaman bahaya di suatu lokasi, risiko dan dampak bencana dapat dikurangi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, MB, 1999 *Do No Harm: How Aid Can Support Peace-or War*, Lyenne Rienner Publisher Inc, London

Brancati, Dawn, 2007, 'Political Aftershocks: The Impact of Earthquakes on Intrastate Conflict' *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 51, No. 5 Oct., 2007, pp. 715-743, Sage Publications. <http://www.jstor.org/stable/27638575>

Barash, D.P, 2000, *Approach to Peace: A Reader in Peace Studies*, Newyork: Oxford University Press.

Bashori, 2010, *LPBI-NU Mengerahkan 300 Santri Siaga Bencana (SSB) Untuk Membantu Korban Gunung Merapi*, media release 28 November 2010, viewed 21 Mei 2013, <<http://lpbi-nu.org/berita/kejadian-bencana/125-lpbi-nu-pusat-mengerahkan-300-santri-siaga-bencana-ssb-untuk-membantu-korban-gunung-merapi.html>>.

Coser, L, A, 1966, *Some Social Functions of Violence*, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 364, p. 8-18, Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science Stable.

URL: <http://www.jstor.org/stable/1034749>. Accessed: 10/09/2012 23:32

Galtung, J, 1968, *Violence, Peace and Peace Research*, Oslo:IPRI.

Neil, Philip and Marjolein Righarts, 2008, '*Natural Disasters and the Risk of Violent Civil Conflict*', *International Studies Quarterly* p 159–185, International Studies Association,

Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.

<http://dvn.iq.harvard.edu/dvn/dv/isq> and at http://www.isanet.org/data_archive

KARINA KAS, 2010, *Laporan Sitasasi Emergency Response Merapi*, Media Release 20 November 2010, Viewed 21 Mei 2013, <<http://www.karinakas.org/i/index.php/home/36-berita/97-laporan-situasi-emergency-response-merapi18>>

KARINA KAS, 2011, Catatan Sejarah Pengalaman Pelayanan KARINA KAS, Media Release 12 Juni 2011, Viewed 21 Mei 2013, <<http://www.karinakas.org/i/index.php/home/36-berita/141-catatan-sejarah-engalaman-pelayanan-karinakas>>

KARINA KAS, 2010, '*Situation Report Emergency Response of Merapi Eruption*', Sitrep #16, KARINA KAS, Magelang.

LPBI NU, 2011, *Laporan Kegiatan Santri Siaga Bencana Kec. Dukun*, LPBI NU, Magelang.

Zamroni, I, 2011, 'Islam dan Keraifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana di Jawa', *Jurnal Penanggulangan Bencana*, vol. 2, no. 1, pp. 1-10.

Wawancara:

Wawancara dengan Ustad Nastro'in, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Inayah Desa Ngargomulyo Kabupeten Dukun, Kab.Magelang, tahun 2013.

Wawancara dengan Kiai Wahid Anshori, Tokoh Masyarakat Kec. Dukun, Kab. Magelang, Tahun 2013.